

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, yang menjadi sebuah tolak ukur kesuksesan dalam pencapaian pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses terjadinya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang secara terus menerus (Hudiyanto, 2014). Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan alokasi sumber daya produktif diantara kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan manusia merupakan suatu kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh kemampuan serta menikmati kesempatan untuk menentukan dan memperluas pilihan di dalam kehidupannya (Jasasila, 2020). Dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan, pembangunan manusia adalah salah satu syarat penting dalam kehidupan suatu negara yang harus ditingkatkan, guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat agar dapat menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan.

Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subjek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat (Sangkereng, Engka and Sumual, 2019). Tolak ukur kesuksesan dalam pencapaian pembangunan ekonomi suatu negara, yang salah satunya dipengaruhi oleh proses pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat diukur melalui *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (Todaro, 2011). Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR), yang memberikan suatu ukuran atas penggabungan tiga indikator terkait dengan pembangunan manusia. Tiga indikator tersebut yaitu angka harapan hidup yang mengukur tingkat kesehatan, angka melek huruf yang mengukur tingkat pendidikan, dan daya beli yang mengukur standar hidup layak (Badan Pusat Statistik, 2017).

Pembangunan manusia penting untuk menjawab tantangan global ekonomi yang semakin berkembang. Solusi jangka panjang terbaik bagi suatu negara adalah sistem sektor pendidikan yang berkualitas sebagai manusia yang berkualitas dan berpengetahuan. Sektor pendidikan ini akan menciptakan sumber daya manusia negara yang akan mendorong negara ke arah yang lebih baik di masa depan, dan akan mendorong adanya pembangunan yang lebih baik.

Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah Ayat

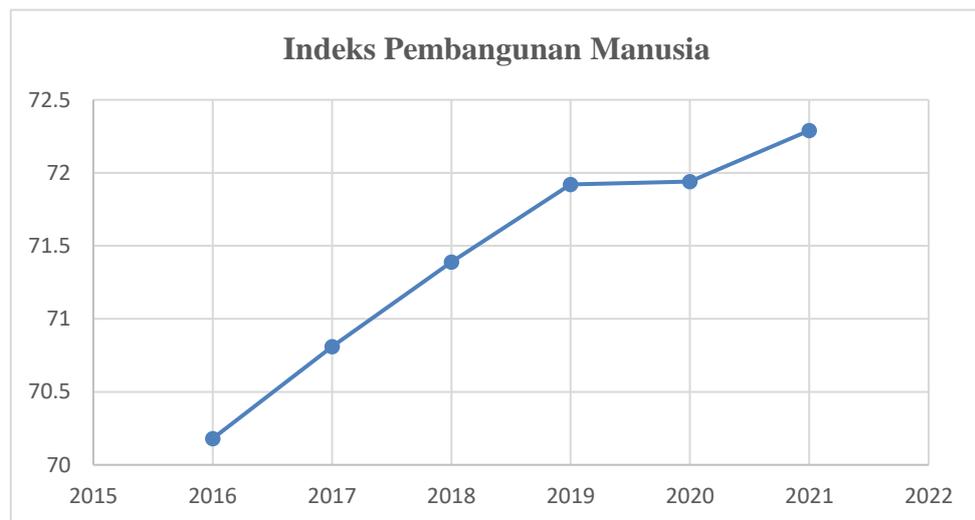
11, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah Ayat 11)*

Berdasarkan ayat tersebut menegaskan adanya keutamaan menuntut ilmu yang menjadi poin penting, karena Allah SWT berjanji akan meninggikan derajat orang-orang berilmu. Ilmu yang akan membantu manusia baik di dunia maupun diakhirat. Melalui ilmu banyak pengetahuan yang akan didapatkan, maka jelas pendidikan merupakan hal penting dalam meningkatkan derajat atau taraf hidup agar terhindar dari segala kesulitan, yang akan dapat meningkatkan pembangunan manusianya. Implementasi nilai ekonomi islam dilakukan atas sistem yang diterapkan dalam suatu komunitas. Dalam menciptakan tatanan ekonomi islam bukan hanya dari kelembagaan saja, tapi juga bersangkutan dengan pengembangan dari sisi manusia selaku subjek dan objek dalam suatu sistem ekonomi tersebut (Yuliadi, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia adalah bentuk refleksi dari pembangunan manusia secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Manusia ditata secara sistematis meliputi tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional sehingga dengan mudah untuk mengetahui peringkat dan ketimpangan pembangunan manusia disuatu daerah. Berdasarkan hal tersebut, tiap-tiap daerah sangat diharapkan untuk terus mengusahakan peningkatan dan perbaikan kualitas pembangunan daerah melalui adanya pengembangan kapasitas dan kualitas masyarakat itu sendiri (Fauzan *et al.*, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 1
Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Pada gambar 1.1, dapat terlihat bahwa dari tahun 2016 hingga 2021, rata-rata skor IPM Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, nilai IPM di Indonesia sebesar 70.18 yang mana nilai tersebut masuk dalam kategori tinggi, dan semakin meningkat hingga pada tahun

2021 nilai IPM di Indonesia sebesar 72.29 peningkatan nilai IPM di Indonesia selama 6 tahun terakhir sebesar 2.11 poin.

Berdasarkan laporan yang diperoleh dari *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia menempati peringkat ke 107 dari 189 negara di dunia. Yang artinya peringkat ke 82 dengan IPM terendah dunia. Dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan IPM Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Meskipun di Indonesia mengalami tren positif pada IPM, akan tetapi jika dibandingkan dengan negara terdekat, kedudukan Indonesia masih tertinggal sangat jauh (CNBCIndonesia, 2020). Meskipun nilai IPM mengalami peningkatan setiap tahun, Indonesia tetap menghadapi tantangan pembangunan manusia yang tidak merata disetiap wilayah. Hal ini seperti yang terjadi di Sumatera. Berikut data yang dapat disajikan terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Tahun 2016-2021:

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Tahun 2016-2021

Provinsi	Tahun						Rerata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Aceh	70.00	70.60	71.19	71.90	71.99	72.18	71.31
Sumatera Utara	70.00	70.57	71.18	71.74	71.77	72.00	71.21
Sumatera Barat	70.73	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65	71.85
Riau	71.20	71.79	72.44	73.00	72.71	72.94	72.35
Jambi	69.62	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63	70.74
Sumatera Selatan	68.24	68.86	69.39	70.02	70.01	70.24	69.46
Bengkulu	69.33	69.95	70.64	71.21	71.40	71.64	70.70
Lampung	67.65	68.25	69.02	69.57	69.69	69.90	69.01
Kep. Bangka Belitung	69.55	69.99	70.67	71.30	71.47	71.69	70.78
Kep. Riau	73.99	74.45	74.84	75.48	75.59	75.79	75.02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa nilai IPM di Sumatera sangat beragam. Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai rerata IPM tertinggi diantara 9 Provinsi lainnya, dengan nilai indeks sebesar 75.02. Sedangkan Provinsi Lampung memiliki nilai rerata IPM terendah dengan nilai indeks sebesar 69.01. Dengan adanya perbedaan yang cukup nyata tersebut menandakan bahwa terdapat kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi antar provinsi di Sumatera.

Walaupun kesenjangan pembangunan manusia masih terjadi, nilai IPM di Sumatera selama periode 2016-2021 masih mengalami peningkatan, artinya pemerintah mengupayakan adanya peningkatan lebih baik terhadap pembangunan manusia yang menyesuaikan dengan adanya rancangan pembangunan yang sebelumnya telah dibuat. Pembangunan manusia tidak terlepas dari adanya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan proses produksi dan distribusi. Agar dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk dalam pasar tenaga kerja, sangat diperlukan adanya upaya penyediaan dan perluasan lapangan kerja, karena tenaga kerjalah yang menghidupkan dan mengembangkan pasar. Pengembangan sumber daya manusia tersebut dilakukan dengan mengubahnya menjadi tenaga kerja produktif (Faellassuffa and Yuliani, 2021).

Tenaga kerja yang mempunyai kualitas baik dapat membantu dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dalam jangka panjang dapat dikatakan bahwa tenaga

kerja merupakan motor penggerak dalam pembangunan. Terdapat indikator yang dapat menjelaskan terkait dengan gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK ini merupakan perbandingan jumlah penduduk dalam kategori Angkatan kerja dengan jumlah penduduk kategori usia kerja (>15 tahun).

TPAK ini berguna untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang memiliki potensi untuk bekerja. TPAK menjadi salah satu parameter kesejahteraan dalam penilaian IPM. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula penawaran tenaga kerja. Tingginya TPAK yang terserap dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian dikarenakan pendapatan seseorang semakin bertambah dan kemudian mempengaruhi peningkatan daya beli sehingga dapat tercapainya standar hidup yang layak (Warits, 2019). Berikut disajikan data terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Tahun 2016-2021:

Tabel 1. 1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Tahun 2016-2021

Provinsi	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	64,26	63.75	64.04	63.13	65.10	65.14
Sumatera Utara	65.99	68.88	71.82	70.19	68.67	69.10
Sumatera Barat	67.08	66.29	67.56	67.88	69.01	67.72
Riau	66.25	64.00	65.24	64.94	65.24	65.03
Jambi	67.54	67.52	68.46	65.79	67.79	67.17
Sumatera Selatan	71.59	69.50	68.69	67.67	68.65	68.77
Bengkulu	72.69	69.30	70.27	70.09	71.73	69.75
Lampung	69.61	67.38	69.62	69.06	70.16	69.35
Kep. Bangka Belitung	68.93	66,72	67.79	67.70	66.89	65.88
Kep. Riau	65.93	66.41	64.33	64.69	66.28	68.27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari Tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. TPAK tertinggi tahun 2021 terjadi pada Provinsi Bengkulu sebesar 69.75 persen. Sedangkan TPAK terendah tahun 2021 terjadi pada Provinsi Riau yakni sebesar 65.03 persen. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (BPS, 2022). Sebagai negara kaya dengan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, Indonesia seharusnya dapat menarik minat Investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Diantara banyaknya pulau yang ada di Indonesia, Sumatera mempunyai potensi investasi cukup kuat guna meningkatkan pembangunan nasional. Berikut disajikan data terkait dengan Investasi di Sumatera Tahun 2016-2021:

Tabel 1. 2
Investasi di Sumatera Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)

Provinsi	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	4,366	1,093	19,242	5,669	8,977	10,873
Sumut	18,760	31,942	24,822	25,442	32,227	26,958
Sumbar	4,921	4,117	4,732	5,383	4,915	5,160
Riau	18,515	25,019	22,897	41,802	49,641	53,050
Jambi	4,751	4,034	4,242	5,256	3,901	6,947
Sumsel	46,789	24,019	23,972	27,969	38,057	34,659
Bengkulu	1,741	2,151	6,733	7,630	8,164	5,270
Lampung	7,249	8,628	14,087	4,757	14,297	13,051
Babel	2,951	3,782	3,733	4,246	2,561	4,330
Kepri	7,864	15,192	15,525	26,107	38,000	25,007

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau

Dari Tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi di Sumatera mengalami fluktuasi yang terjadi tiap tahunnya. Banyak sektor potensial yang apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang mendorong terjadinya peningkatan pembangunan mausia. Sumber daya alam yang ada di Sumatera memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan demikian sangat cocok untuk sektor perindustrian dan perdagangan. Potensi wilayahnya terkenal dengan kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bijih bauksit, batu bara, dan gas alam. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Sumatera (Sosilawati *et al.*, 2017).

Di samping memiliki beberapa sektor potensial, Sumatera juga menjadi pintu akses utama bagi Indonesia bagian barat dan juga memiliki *Free Trade Zone* atau Kawasan Bebas di empat lokasi, yakni di Sabang, Bintan, Karimun, dan Batam yang seharusnya membuat Sumatera menjadi wilayah yang menjanjikan untuk bisa menarik minat investor dalam negeri juga asing. Adanya investasi atau penanaman modal di suatu daerah, akan membantu terciptanya peningkatan Pembangunan.

Hal tersebut mendorong adanya bisnis atau berdirinya pabrik baru, adanya penawaran teknologi dari investor baik dalam bentuk produksi atau permesinan yang akan menciptakan lapangan pekerjaan (Lusiana, 2012). Terbentuknya lapangan pekerjaan baru akan dapat memberi kesempatan kerja bagi masyarakat, yang nantinya dapat

meningkatkan konsumsi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Begitupun dengan perusahaan yang akan memberikan jaminan kesejahteraan dan kesehatan para pekerjanya melalui adanya jaminan sosial yang akan meningkatkan pembangunan manusia (Helvira and Rizki, 2020).

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengakses atau mengadaptasi teknologi informasi dan komunikasi, serta belum meratanya pembangunan terkait dengan sarana dan prasarana penunjang aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu penyebab masih rendahnya pembangunan manusia di wilayah tertentu. Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Pembangunan Manusia di suatu wilayah. Bagi negara berkembang, akses internet sebagai teknologi informasi menjadi salah satu pemecahan masalah dalam memangkas disparitas *human resources* lantaran teknologi informasi tidak terbatas ruang, jarak, dan waktu. Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat berperan penting di Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menghubungkan dan menyebarkan informasi agar ketertinggalan dengan negara lain dapat diminimalisir dalam proses pembangunan (Wardhana, Kharisma and Lisdiyanti, 2020).

Berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi di suatu wilayah dapat diketahui dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). IP-TIK adalah suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan

komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK (BPS, 2021). Berikut disajikan data terkait dengan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sumatera Tahun 2016-2021:

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sumatera Tahun 2016-2021

Provinsi	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	3.41	4.49	4.66	4.91	5.27	5.54
Sumatera Utara	3.69	4.65	4.94	5.19	5.44	5.75
Sumatera Barat	4.24	5.00	5.12	5.25	5.52	5.92
Riau	4.26	5.08	5.25	5.33	5.74	5.90
Jambi	3.92	4.66	4.91	5.17	5.49	5.73
Sumatera Selatan	3.80	4.63	4.81	4.91	5.30	5.64
Bengkulu	3.93	4.78	4.88	5.21	5.55	5.85
Lampung	3.32	4.20	4.50	4.83	5.15	5.58
Kep. Bangka Belitung	4.00	4.70	4.89	5.25	5.54	5.71
Kep. Riau	5.59	5.89	6.14	6.36	6.46	6.58

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa, terjadi peningkatan selama 6 tahun terakhir pada IP-TIK di Sumatera. Terjadinya peningkatan IP-TIK ini menandakan bahwa ada eskalasi pendayagunaan terhadap TIK pada aktivitas harian. Pandemi Covid-19 mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pembangunan TIK adalah termasuk salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Penggunaan TIK yang efektif akan mendorong tumbuhnya wawasan dan produktivitas manusia. Karena, akses informasi dan pengetahuan memberdayakan individu dengan mempengaruhi kemampuan belajar, daya pikir, dan kemampuan

berkolaborasi dengan orang lain. Orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan dan keluarga dengan pendapatan terbatas sering menghadapi tantangan dalam mengakses peluang pendidikan yang berkualitas, dimana TIK mempromosikan pendekatan praktis dan berguna untuk mengurangi masalah mengakses pendidikan melalui pendidikan berbasis rumah dan pendidikan melalui *e-learning*. Dengan demikian TIK berpotensi menghilangkan hambatan dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup (Khan, Ju and Hassan, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari beberapa komponen yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Investasi, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Maka, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Tahun 2016-2021.

B. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah bertujuan untuk membatasi agar permasalahan yang akan diteliti tidak melenceng dan akan terfokuskan pada inti dari permasalahan dan pembahasannya, sehingga tujuan dari penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Dengan demikian dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
2. Tahun yang dijadikan objek penelitian adalah tahun 2016 sampai dengan 2021.
3. Analisis diolah dengan menggunakan metode analisis data panel dan menggunakan data sekunder.
4. Analisis dilakukan terbatas pada variabel yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera. Variabel independen yang digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Investasi, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera tahun 2016-2021?
2. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera tahun 2016-2021?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera tahun 2016-2021?

4. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Investasi, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera tahun 2016-2021?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera tahun 2016-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh Investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera tahun 2016-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera tahun 2016-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Investasi, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera tahun 2016-2021.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang indeks pembangunan manusia (IPM) dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang indeks pembangunan manusia (IPM).

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk menentukan upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia, terutama wilayah Sumatera demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.